LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKj) TAHUN 2018

BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 dapat selesai disusun.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Gubernur mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang secara berkala setiap tahun disusun laporannya. Kami berharap Laporan Kinerja yang kami susun dapat menyajikan informasi yang diperlukan atas kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, [illegible] Januari 2019
KEPALA BIRO ORGANISASI,

MARJANI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Gambaran Umum 1

1. Pendahuluan ……..... 1
2. Susunan Organisasi ……..... 1
3. Tugas Pokok dan Fungsi ..…..... 2
4. Sumber Daya Aparatur ..…..... 11
5. Sumber Daya Keuangan ..…..... 13
6. Sarana dan Prasarana ..…..... 14

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA …….... 22

A. Perencanaan Strategis …… 22

1. Visi ..…..... 22
2. Misi ..…..... 22
3. Tujuan dan SasaranStrategis ...…….. 23

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ……..... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. Capaian Kinerja Organisasi ……..... 26

B. Realisasi Anggaran ……..... 57

BAB IV PENUTUP..... 59

LAMPIRAN :

1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2018.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Struktur Organisasi SKPD.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. GAMBARAN UMUM.

1. Pendahuluan

Biro Organisasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi.

Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Biro.

2. Bagian Kelembagaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kelembagaan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). *Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

2). *Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

3). *Sub Bagian Tata Usaha Biro.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

3. Bagian Ketatalaksanaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Ketatalaksanaan (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro**.**

Bagian Ketatalaksanaan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur.

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

2). *Sub Bagian Pelayanan Publik.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

3). *Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

4. Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaiaan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian (Pejabat Struktural Eselon III.a) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro**.**

Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :

1). Sub Bagian Analisis Jabatan.

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

2). *Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

3). *Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah.*

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (Pejabat Struktural Eselon IV.a) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fugsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro.

(Susunan Organisasi dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini).

3. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tugas Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) perumusan program kerja di bidang organisasi;
b) perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang organisasi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) pelaksanaan tugas lainnya di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan susunan organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, maka tugas pokok masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro (Eselon II.b)

Kepala Biro Organisasi mempunyai tugas memimpin, membina, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan serta mengkoordinasikan kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Biro Organisasi mempunyai fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang organisasi;
b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan serta kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang organisasi pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang organisasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bagian Kelembagaan (Eselon III.a)

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan dan melaksanakan analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis dan pelaksanaan Tata Usaha Biro. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bagian Kelembagaan;
b. Penyiapan bahan, perumusan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. Pembinaan dan pengawasan di bidang kelembagaan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang kelembagaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelembagaan, membawahi :

a. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis;
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kelembagaan.

Bagian Kelembagaan membawahi Kepala Sub Bagian (Eselon IV.a) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :

a. Sub Bagian Bagian Kelembagaan Provinsi.

Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Kelembagaan Provinsi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
b) Pengumpulan, pengolahan, penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kelembagaan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kelembagaan perangkat daerah Provinsi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis

Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/kota dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan

pemerintah daerah di bidang kelembagan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang kelembagaan, analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, evaluasi kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis serta lembaga non struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan tugas lain di bidang kelembagaan Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan Biro serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha Biro, mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kegiatan Biro;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana di Sub Bagian Tata Usaha Biro;
d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Biro;
e) Pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Biro;
f) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Tata Usaha Biro;
g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha Biro;
i) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

j) Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha Biro yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan (Eselon III.a)

Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang standarisasi, sistem dan prosedur, pelayanan publik serta akuntabilitas dan pengembangan kinerja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bagian Ketatalaksanaan;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang standarisasi, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang ketatalaksanaan yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketatalaksanaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a. Sub Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur;
b. Sub Bagian Pelayanan Publik;
c. Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.

Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Ketatalaksanaan.

a. Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur.

Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang standarisasi, sistem dan prosedur tata naskah dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur;

b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Standarisasi, Sistem dan Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta penyusunan pedoman tata naskah dinas, standarisasi sarana dan prasarana dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang standarisasi, sistem dan prosedur serta tata naskah dinas yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Pelayanan Publik.

Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Pelayanan Publik mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Pelayanan Publik;
b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang pelayanan publik dan manajemen mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan publik yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja.

Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang akuntabilitas dan Pengembangan kinerja serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja;
b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang akuntabilitas, pengembangan kinerja, budaya kerja dan penyusunan LAKIP Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang akuntabilitas dan pengembangan kinerja yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaiaan (Eselon III.a)

Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang analisis jabatan, formasi dan reformasi birokrasi serta kepegawaian dan perpustakaan sekretariat daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang formasi dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan perpustakaan sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Pembinaan dan pengawasan di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. Pelaksanaan tugas lain di bidang analisis jabatan dan kepegawaian sekretariat daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Analisis Jabatan dan kepegawaian, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
a. Sub Bagian Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi;
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian.

a. Sub Bagian Analisis Jabatan.

Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang analisis jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Analisis Jabatan;
b) Pengumpulan, pengolahann dan penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Analisis Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang analisis jabatan, stándar kompetensi jabatan, uraian jabatan dan ususlan kebutuhan dilat struktural/fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang analisis jabatan yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi.

Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang formasi dan reformasi birokrasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi;
b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang formasi dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Formasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Formasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Formasi dan Reformasi Birokrasi dan penyusunan análisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Formasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Formasi dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang Formasi dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda.

Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Setda mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah;
b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan pelaksana pada Sub Bagian Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah. Usulan jabatan, kenaikan pangkat, pensiun, penataan kebutuhan pegawai, pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, pengelolan sistem informasi manajemen kepegawaian, konsumsi dan pelaksanaan senam pagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;

g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h) Pelaksanaan tugas lain di bidang di bidang Kepegawaian dan Perpustakaan Sekretariat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini didukung oleh 33 orang pegawai.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin jumlah Pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar sebagaimana terlihat pada ***Tabel 1.1.*** sebagai berikut :

Tabel 1.1.
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pasca Sarjana	2	5	7
2.	Sarjana/D IV	8	11	19
3.	Diploma III	0	2	2
4.	SLTA	1	4	5
	J U M L A H	**11**	**21**	**33**

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

Bila dilihat dari jenjang kepangkatan dan golongan sumber daya manusia pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat pada ***Tabel 1.2.*** sebagai berikut:

Tabel 1.2.
JUMLAH PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN dan JENIS KELAMIN
TAHUN 2018

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	Pembina Tingkat I / IV b	1	2	3
2.	Pembina / IV a	1	2	3
3.	Penata Tingkat I / III d	2	2	4
4.	Penata / III c	2	1	3
5.	Penata Muda Tingkat I / III b	2	5	7
6.	Penata Muda / III a	3	10	13
	J U M L A H	**11**	**22**	**33**

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, dari jumlah 33 orang pegawai Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, yang menduduki sebagai ***Jabatan Struktural sebanyak 10 pegawai*** terbagi atas : untuk eselon II.b sebanyak 1 orang, eselon III.a sebanyak 2 orang dan eselon IV.a sebanyak 7 orang. Saat ini untuk formasi jabatan struktural telah terisi semua. Untuk lebih jelasnya susunan Pejabat Struktural dilingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat pada ***Tabel 1.3*** di bawah ini.

Tabel 1.3.
PEGAWAI BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL
TAHUN 2018

NO	JABATAN / NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
A	**ESELON II.a**			
	1 Marjani, SE, M.Si	S-2	IV/b	Kepala Biro
B	**ESELON III.a**			
	1 Chasmiati, S.IP, M.Si	S-2	IV/b	Kabag Ketatalaksanaan
	2 Dra. Yunda Rochaningsih	S-1	IV/b	Kabag Analisis Jabatan dan Kepegawaian
C	**ESELON IV.a**			
	1 Wida Febriana, S.Sos, M.Si	S-2	III/d	Kasubbag Kelembagaan Provinsi
	2 M. Sofwan, S.IP, M.Si	S-2	IV/a	Kasubbag Kelembagaan Kab/Kota dan UPT
	3 Hairudin, SE	S-1	III/d	Kasubbag Tata Usaha Biro

NO	JABATAN / NAMA	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
	4 Hamdani, S.Sos	S-1	III/c	Kasubbag Standarisasi, Sistem dan Prosedur
	5 Glen Septian ADS, S.STP	S-1	III/d	Kasubbag Akuntabilitas dan Pengembangan Kinerja
	6 Eka Wulandari, S.STP,M.Ec.Dv	S-2	IV/a	Kasubbag Analisis Jabatan
	7 Dewi Ginasari, S.STP, M.Si	S-2	IV/a	Kasubbag Formasi dan Reformasi Birokrasi

Sumber : Data DUK Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

Untuk posisi Jabatan Fungsional tertentu saat ini belum ada formasi, yang ada hanya formasi untuk Jabatan Fungsional Umum sebanyak 23 orang PNS.

5. Sumber Daya Keuangan.

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi motivasi kerja dan kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya di Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Pada Tahun Anggaran 2018, Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.654.670.850,00** untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada ***Tabel 1.4.*** sebagai berikut :

Tabel 1.4.
REKAPITULASI APBD PER JENIS BELANJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Belanja Tidak Langsung**			
	Belanja Pegawai :			
	-Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0
	-Tambahan Penghasilan PNS	0,00	0,00	0
	JUMLAH BTL	**0,00**	**0,00**	**0**

2.	**Belanja Langsung**			
	Belanja Pemeliharaan	48.200.000,00	45.575.000,00	94,55
	Belanja Barang dan Jasa	2.601.270.850,00	2.486.197.700,00	93,87
	Belanja Modal	5.200.000,00	5.200.000,00	100
	JUMLAH BL	**2.654.670.850,00**	**2.536.972.700,00**	**95,57**
	JUMLAH SELURUHNYA	**2.654.670.850,00**	**2.536.972.700,00**	**95,57**

Sumber : Data Keuangan Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

Dari jumlah anggaran tersebut di atas, dialokasikan untuk alokasi Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 48.200.000,00, untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.601.270.850,00 serta untuk Belanja Modal sebesar Rp. 5.200.000,00.

6. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati salah Gedung di Komplek Kantor Gubernur Kalbar pada Lantai 2 yang terletak di Jl. A. Yani Pontianak.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, dapat dilihat pada ***Tabel 1.6,*** di bawah ini :

Tabel 1.5.
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR
TAHUN 2018

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Harga	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Avanza	2006	180,000,000.00	APBD
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	Suzuki Vitara	2010	291,750,000.00	APBD
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	New Avanza	2012	171,000,000.00	APBD
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	13,200,000.00	APBD
5	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR	2008	14,380,000.00	APBD
6	Sepeda Motor	Honda 125	2011	16,242,400.00	APBD
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	16,288,575.00	APBD
11	Cermin Besar (200x75 cm)		2005	800,000.00	APBD
12	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olivetti	2004	931,000.00	APBD
13	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2006	931,000.00	APBD

14	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2008	1,080,000.00	APBD
15	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2012	3,768,475.00	APBD
16	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2012	3,768,475.00	APBD
17	Mesin Cetak Stereo Pioner (Braile)	Persona	2009	45,837,000.00	APBD
18	Mesin Absen (Time Recorder)	REKABIO	2014	50,527,500.00	APBD
19	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
20	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
21	Lemari Besi/Metal	Brother	2012	2,361,575.00	APBD
22	Lemari Besi/Metal	Presiden	2002	1,060,000.00	APBD
23	Lemari Besi/Metal	Sibas	2006	1,650,000.00	APBD
24	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
25	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
26	Lemari Besi/Metal	Alba	2006	2,300,000.00	APBD
27	Lemari Besi/Metal	Atlantic	2002	1,650,000.00	APBD
28	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,697,750.00	APBD
29	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,697,750.00	APBD
30	Lemari Besi/Metal	Sibas	2008	2,697,750.00	APBD
31	Lemari Besi/Metal	Brother	2018	2.985.735.00	APBD
32	Filling Besi/Metal	Brother	2012	1,607,885.00	APBD
33	Filling Besi/Metal	Alba	2000	2,000,000.00	APBD
34	Filling Besi/Metal	Alba	2006	2,000,000.00	APBD
35	Filling Besi/Metal	Delta	2006	2,100,000.00	APBD
36	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
37	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
38	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
39	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
40	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
41	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	1,752,000.00	APBD
42	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
43	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
44	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
45	Filling Besi/Metal	Ichiban	2008	2,702,500.00	APBD
46	Filling Besi/Metal	Brother	2018	2.681.130,00	APBD
47	Filling Besi/Metal	Brother	2018	1.716.805,00	APBD
48	Band Kas/ Brankas	Cosmos	2005	2,850,000.00	APBD
49	Alat Penghancur Kertas	KAZURE SHREDDER	2016	2,671,993.00	APBD
50	Overhead Projektor	Acer	2009	8,000,000.00	APBD
51	Overhead Projektor	Acer	2013	4,612,773.00	APBD
52	Kotak Katalog/ Brosur	Alba	2006	676,000.00	APBD
53	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
54	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
55	Meja kayu/Rotan	Marco	2000	500,000.00	APBD
56	Meja kayu/Rotan	Briliant	2006	300,000.00	APBD
57	Meja Rapat	Briliant	2013	2,105,831.00	APBD
58	Meja Tulis	Marco	2006	100,000.00	APBD
59	Meja Resepsionis	Briliant	2006	500,000.00	APBD
60	Kursi Rapat	Comporpro	2013	651,805.00	APBD
61	Kursi Rapat	Comporpro	2013	651,805.00	APBD
62	Kursi Rapat	Comporpro	2013	651,805.00	APBD
63	Kursi Rapat	Comporpro	2013	651,805.00	APBD
64	Kursi Rapat	Fantoni	2010	610,000.00	APBD

65	Kursi Rapat	Fantoni	2010	610,000.00	APBD
66	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
67	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
68	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
69	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
70	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
71	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
72	Kursi Rapat	fantoni	2008	457,500.00	APBD
73	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
74	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
75	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
76	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
77	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
78	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
79	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
80	Kursi Rapat	Fantoni	2008	457,500.00	APBD
81	Kursi tamu	Jati	2008	8,500,000.00	APBD
82	Kursi tamu	Fantoni	2013	10,562,500.00	APBD
83	Kursi tamu	Fantoni	2014	17,344,944.00	APBD
84	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
85	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
86	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
87	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
88	Kursi Putar	ASIMA	2008	405,000.00	APBD
89	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
90	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
91	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
92	Kursi Putar	UCHIWA	2006	1,988,000.00	APBD
93	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
94	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
95	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
96	Kursi Putar	Fantoni	2010	962,500.00	APBD
97	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
98	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
99	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
100	Kursi Putar	Fantoni	2010	528,000.00	APBD
101	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
102	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
103	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
104	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
105	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
106	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
107	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
108	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
109	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
110	Kursi Lipat	Futura	2006	200,000.00	APBD
111	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
112	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
113	Meja Komputer	Briliant	2006	480,250.00	APBD
114	Tikar		2013	23,866,080.00	APBD
115	Tikar		2012	53,451,900.00	APBD
116	Sofa	Fantoni	2006	8,000,000.00	APBD
117	Mesin Penghisap Debu	Sharp	2010	1,538,050.00	APBD
118	Lemari Es	Sanyo	2009	2,453,000.00	APBD
119	AC Unit	GREE	2016	8,525,647.00	APBD
120	AC Unit	GREE	2016	8,525,647.00	APBD

121	AC Unit	LG	2013	5,160,270.00	APBD
122	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
123	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
124	AC Unit	LG	2013	6,644,160.00	APBD
125	AC Unit	LG	2013	6,644,160.00	APBD
126	AC Unit	LG	2013	3,754,460.00	APBD
127	AC Unit	Panasonic	2006	13,000,000.00	APBD
128	AC Unit	AUX	2018	7.475.221,00	APBD
129	Televisi	Sanyo	2010	1,743,150.00	APBD
130	Televisi	LG	2006	21,700,000.00	APBD
131	Televisi	Shap	2009	11,599,500.00	APBD
132	Amplifier	ADC	2006	2,100,000.00	APBD
133	Sound System	BMC	2006	4,800,000.00	APBD
134	Sound System	BMC	2006	4,800,000.00	APBD
135	Laser Disc	DATS	2006	1,350,000.00	APBD
136	Wireless	WM 2800	2006	700,000.00	APBD
137	Wireless	JMK	2013	6,417,771.00	APBD
138	Unit Power Supply (UPS)	Power Pro	2013	915,714.00	APBD
139	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2012	902,005.00	APBD
140	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2012	902,005.00	APBD
141	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
142	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
143	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
144	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2012	592,905.00	APBD
145	Unit Power Supply (UPS)	ICA CP1400	2011	1,462,820.00	APBD
146	Unit Power Supply (UPS)	ICA CP1400	2011	1,462,820.00	APBD
147	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2008	1,500,000.00	APBD
148	Unit Power Supply (UPS)	Power Tree	2008	1,500,000.00	APBD
149	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
150	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
151	Unit Power Supply (UPS)	Canon	2006	5,700,000.00	APBD
152	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
153	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
154	Unit Power Supply (UPS)	Prolink Pro 700	2014	1,006,000.00	APBD
155	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2010	1,489,677.00	APBD
156	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
157	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
158	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
159	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
160	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
161	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
162	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
163	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2016	1,656,194.00	APBD
164	Unit Power Supply (UPS)	ICA	2018	1.408.074,00	APBD
165	Tangga Alumunium	Alumanium	2013	745,071.00	APBD
166	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD
167	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD
168	P.C. Unit	LG	2008	16,266,667.00	APBD
169	P.C. Unit	LG	2010	5,639,500.00	APBD
170	P.C. Unit	LG	2010	5,639,500.00	APBD
171	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
172	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
173	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
174	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
175	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
176	P.C. Unit	New Power Pro	2013	7,080,000.00	APBD

177	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
178	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
179	P.C. Unit	LG	2015	7,850,380.00	APBD
180	P.C. Unit	Intel Xeon	2014	45,446,000.00	APBD
181	P.C. Unit	AIO LENOVO C4030	2015	15,838,973.00	APBD
182	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
183	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
184	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
185	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
186	P.C. Unit	Simbada	2012	6,974,180.00	APBD
187	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
188	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
189	P.C. Unit	New Power Pro	2012	6,979,027.00	APBD
190	P.C. Unit	New Power Pro	2013	7,080,000.00	APBD
191	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
192	P.C. Unit	Dell	2013	9,000,924.00	APBD
193	P.C. Unit	LG	2015	7,850,380.00	APBD
194	P.C. Unit	Intel Xeon	2014	45,446,000.00	APBD
195	P.C. Unit	AIO LENOVO C4030	2015	15,838,973.00	APBD
196	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
197	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
198	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
199	P.C. Unit	PC HP	2016	8,501,794.00	APBD
200	P.C. Unit	HP/All-In-One	2018	8.020.996,00	APBD
201	Note Book	Acer	2008	12,000,600.00	APBD
202	Note Book	Acer	2009	12,750,000.00	APBD
203	Note Book	Acer	2008	12,980,000.00	APBD
204	Note Book	Acer	2008	13,750,000.00	APBD
205	Note Book	Acer	2008	13,750,000.00	APBD
206	Note Book	Acer	2010	8,818,150.00	APBD
207	Note Book	Acer	2010	8,818,150.00	APBD
208	Note Book	Acer	2011	9,432,700.00	APBD
209	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
210	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
211	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
212	Note Book	Toshiba	2012	8,029,353.00	APBD
213	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
214	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
215	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
216	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
217	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
218	Note Book	Toshiba	2013	8,493,519.00	APBD
219	Note Book	Touch Screan	2014	10,100,200.00	APBD
220	Note Book	Acer	2016	11,609,918.00	APBD
221	Note Book	Acer	2016	11,609,918.00	APBD
222	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
223	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
224	Laptop/Note Book	Lenovo ideapad	2018	8.020.996,00	APBD
225	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
226	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
227	Monitor	Dell	2012	1,959,605.00	APBD
228	Monitor	LG Flatron ez T 530S	2007	4,072,000.00	APBD
229	Monitor	LG Flatron ez T 530S	2007	4,072,000.00	APBD

230	Printer	Pixma	2010	922,850.00	APBD
231	Printer	Pixma	2010	922,850.00	APBD
232	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
233	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
234	Printer	Canon Pixma	2012	964,548.00	APBD
235	Printer	Canon Injeksi	2013	2,228,170.00	APBD
236	Printer	Canon Injeksi	2013	2,228,170.00	APBD
237	Printer	Canon Injeksi	2013	2,228,170.00	APBD
238	Printer	Epson	2012	8,067,639.00	APBD
239	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
240	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
241	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
242	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
243	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
244	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
245	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
246	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
247	Printer	Canon Pixma	2012	949,655.00	APBD
248	Printer	Epson	2013	8,178,000.00	APBD
249	Printer	Epson	2013	8,178,000.00	APBD
250	Printer	Canon	2015	4,312,181.00	APBD
251	Printer	HP	2015	1,658,531.00	APBD
252	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
253	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
254	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
255	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
256	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
257	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
258	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
259	Printer	Canon Pixma	2016	1,203,500.00	APBD
260	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
261	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
262	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
263	Printer	Epson L 360	2018	2.433.957,00	APBD
264	Printer	Epson L 560	2018	5.200.000,00	APBD
265	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Briliant	2006	445,000.00	APBD
266	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2000	650,000.00	APBD
267	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2000	650,000.00	APBD
268	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2002	650,000.00	APBD
269	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Marco	2002	650,000.00	APBD
270	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	675,000.00	APBD
271	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
272	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
273	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2006	400,000.00	APBD
274	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
275	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
276	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
277	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Briliant	2006	400,000.00	APBD
278	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Marco	2000	850,000.00	APBD
279	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Marco	2000	850,000.00	APBD
280	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
281	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
282	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
283	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
284	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
285	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD

286	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
287	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
288	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,189,500.00	APBD
289	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
290	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
291	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Ponti	2000	1,186,500.00	APBD
292	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
293	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
294	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
295	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2001	445,000.00	APBD
296	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Monaco	2006	445,000.00	APBD
297	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Monaco	2001	445,000.00	APBD
298	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
299	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
300	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2000	445,000.00	APBD
301	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
302	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
303	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
304	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
305	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
306	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
307	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
308	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
309	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
310	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
311	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
312	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
313	Kursi Krja Pegawai Non Struktural	Fantoni	2008	445,000.00	APBD
314	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
315	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
316	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
317	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
318	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
319	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
320	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
321	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Ponti	2000	445,000.00	APBD
322	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Adi Tech	2003	4,000,000.00	APBD
323	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	2006	1,112,000.00	APBD
324	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Alba	2008	1,112,000.00	APBD
325	Microphone/Wireless Mic	BATT	2006	900,000.00	APBD

326	Microphone/Wireless Mic	BATT	2006	900,000.00	APBD
327	Camera Electronic	Canon	2013	8,608,838.00	APBD
328	Exhaust Fan	Sanyo	2011	1,800,000.00	APBD
329	Exhaust Fan	Sanyo	2011	1,800,000.00	APBD
330	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	3,049,200.00	APBD
331	Meja Kerja	Import	2009	695,000.00	APBD
332	Meja Kerja	Import	2009	6,949,800.00	APBD
333	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	3,049,200.00	APBD
334	Meja Kerja	Import	2009	695,000.00	APBD
335	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
336	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
337	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
338	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	1,622,500.00	APBD
339	Meja Kerja	Haigh Paint	2010	1,622,500.00	APBD
340	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
341	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
342	Meja Kerja	Monaco	2007	1,650,000.00	APBD
343	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
344	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
345	Meja Kerja	Monaco	2008	2,450,000.00	APBD
346	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
347	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
348	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
349	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
350	Meja Kerja	Monaco	2008	1,637,300.00	APBD
351	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
352	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
353	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
354	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
355	Meja Kerja	Monaco	2008	1,646,000.00	APBD
356	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
357	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
358	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
359	Meja Kerja	Marco	2002	650,000.00	APBD
360	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
361	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
362	Meja Kerja	Marco	2001	601,000.00	APBD
363	Meja Kerja	Briliant	2006	330,000.00	APBD
364	Meja Kerja	Monaco	2008	2,467,500.00	APBD
365	Layar	GALAXI	2013	892,472.00	APBD
366	Layar	GALAXI	2013	892,472.00	APBD
	JUMLAH			**1,942,254,675.00**	

Sumber : Data Aset Biro Organisasi Setda Prov. kalbar Tahun 2018

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).

Secara umum yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah :

1. Penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan proporsional berdasarkan kewenangan karakteristik dan potensi daerah.
2. Perubahan dan perkembangan kebijakan aparatur.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Perlunya peningkatan kemampuan Pegawai dalam melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs)*, keluaran (*outputs)* dan hasil *(outcomes)*.

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi atau organisasi perangkat daerah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, dengan berbekal kekuatan yang dimiliki maupun kelemahan akan dijadikan tantangan untuk menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dengan mengacu kepada visi dan misi Setda dan agar tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, maka telah ditetapkan Visi Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar yaitu :

"**Menciptakan Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Yang Modern Menuju Kepemerintahan Daerah Yang Baik *(Good Local Governance)*".**

Organisasi dan manajemen pemerintahan yang modern bermakna sosok kelembagaan Pemerintah Daerah yang proporsional, dinamis dan responsif yang dilengkapi dengan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan kebutuhan dinamika perubahan dalam masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila baik secara institusi, individu maupun sistem diisi oleh aparatur yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan *good local governance* atau kepemerintahan daerah yang baik mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1) Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif dan proporsional serta tepat waktu sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat.

2) Mewujudkan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif sesuai dengan dinamika perubahan;
3) Mewujudkan pendayagunaan aparatur secara sistemik;
4) Mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *Good Local Governanve.*

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun).

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar adalah :

TUJUAN STRATEGIS		**SASARAN STRATEGIS**	
1		2	
1.	Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karak-teristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integ-rasi, sinkronisasi dan simpilikasi.	1	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pem-bangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
2.	Mewujudkan standarisasi, system dan prosedur ketatalaksanaan serta men-dorong penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyeleng-garaan pelayanan publik.	2	Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif dan mewujudkan Penyelenggara Pelayanan Publik yang terstandar dan berkualitas.
3.	Meningkatkan pembinaan dan pe-ngembangan sumber daya manusia aparatur.	3	Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda.
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dae-rah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.	4	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kiner-ja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.

B. PERJANJIAN KINERJA (PERJANKIN) TAHUN 2018

Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, po-tensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung pe-ningkatan pembangunan ma-syarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi	1. Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Provinsi
		2. Jumlah penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	5 Rancangan Pergub
		3. Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi	14 Kab/Kota
		4. Jumlah peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalbar	80 Peserta
		5. koordinasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Prov. Kalbar	1 Laporan
2.	Meningkatnya sistem, prose-dur dan standarisasi ketatalak-sanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penye-lenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1. Jumlah SOP yang telah di review	20 SOP
		2. Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan evaluasi dibidang ketatalaksanaan	4 Kab/Kota
		3. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan	1 Pergub
		4. Persentase pencapaian penerapan SPM di Provinsi Kalbar	100%
		5. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%
		6. Jumlah Kab/Kota yang di monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan publik	14 Kab/Kota
		7. Jumlah inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Prov. Kalbar	11 Inovasi

3.	Terwujudnya pembinaan apa-ratur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya infor-masi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatnya kualitas sum-berdaya aparatur setda, serta pemanfaatan perpustakaan setda.	1. Jumlah dokumen Formasi PNS	15 Dokumen
		2. Jumlah Unit Kerja yang diasistensi dalam penyusunan formasi PNS	113 Unit Kerja
		3. Jumlah dokuemn jabatan fungsional	1 Dokumen
		4. Jumlah dokumen ABK perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar	5 Dokumen
		5. Jumlah unit kerja yang menyampaikan dokumen analisis jabatan di lingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen
		6. Jumlah Kab/Kota yang menyusun analisis jabatan	13 Kab/Kota
		7. Persentase jumlah aparatur penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah yang terlatih	70%
		8. Pembinaan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) PNS di lingkungan Setda Prov.Kalbar	1 Tahun
		9. Jumlah administrasi kepegawaian yang telah diverifikasi	100%
		10. Jumlah pengunjung yang dating ke perpustakaan setda	350 orang
4.	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.	1. Jumlah Laporan Kinerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan
		2. Jumlah Perjanjian Kerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan
		3. Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik dan benar	75%
		4. Persentase perangkat daerah yang menyusun cascading kinerja perangkat daerah	95%

Program :	**Anggaran :**
1. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp. 452.152.950,00
2. Program Penataan Ketatalaksanaan	Rp. 392.749.400,00
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Rp. 741.346.225,00
4. Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 249.698.775,00
Jumlah total angaran Sasaran Strategis	**Rp. 1.835.947.350,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, ada 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

1. Tertatanya lembaga perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang efisien, efektif dan proporsional yang proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
2. Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mewujudkan penyelenggara pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas.
3. Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan reformasi birokrasi serta meningkatnya kualitas kualitas sumberdaya aparatur Setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan Setda.
4. Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi :

1). Mewujudkan kelembagaan perangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi.
2). Mewujudkan standarisasi, sistem dan prosedur ketatalaksanaan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
3). Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
4). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan di atas diupayakan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian misi yang telah ditetapkan yaitu :

1) Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/kota yang efisien, efektif dan proporsional serta tepat waktu sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat.
2) Mewujudkan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif sesuai dengan dinamika perubahan;
3) Mewujudkan pendayagunaan aparatur secara sistemik;
4) Mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *Good Local Governanve.*

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran di atas akan diuraikan berikut ini :

Sasaran 1 **:** ***"Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang efisien, efektif dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi".***

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 1 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan :

a. Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi.
b. Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
c. Penyusunan Peraturan Gubernur Tupoksi Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.
d. Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota.
e. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar.
f. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT di Lingkungan Prov.Kalbar.

Alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sebesar ***Rp. 452.152.950,00*** dengan realisasi sebesar ***Rp. 431.927.700,00*** atau ***95,53 %.***

Secara lebih rinci, pencapaian indikator sasaran tersebut, yaitu:

Tabel 3.1

Pencapaian Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	%
1.	Tertatanya kelembagaan perangkat daerah Pro-vinsi/Kabupaten/Kota yang efisien, efektif dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakte-ristik, potensi dan ke-mampuan daerah dalam rangka mendukung pe-ningkatan pembangunan masyarakat dengan me-nerapkan prinsip koor-dinasi, integrasi, sinkroni-sasi dan simplikasi	1. Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Provinsi	2 Provinsi	100
		2. Jumlah penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	5 Rancangan Pergub	15 Pergub	300
		3. Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	%
		4. Jumlah peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalbar	80 Peserta	80 Peserta	100
		5. koordinasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Prov. Kalbar	1 Laporan	1 Laporan	100
	Niliai Capaian Sasaran Strategis				**133,33**

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ***"Melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat"***.

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***"Tertatanya lembaga perangkat daerah yang proporsional, dinamis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi",*** mencapai **100%** atau dapat dikatagorikan ***"Sangat Berhasil"***. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran 1, adalah :

- Untuk indikator : Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
  Kalbar.
  Target : 2 Provinsi
  Realisasi : 2 Provinsi

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :
  Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
  Maksud kegiatan pengembangan wawasan dalam rangka penataan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan konseptual staf dalam menyusun dan merumuskan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.
  Sedangkan tujuan pelaksanaan program pengembangan wawasan dalam rangka penataan kelembagaan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik oleh Pejabat Struktural/Staf di lingkungan Biro Organisasi dengan melakukan pembelajaran.
  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.769.300,00 atau 91,19%.
  Kegiatan ini telah dilakukan pada 2 (dua) Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada bulan April dan September 2018.

- Untuk indikator : Jumlah penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar.
  Target : 5 Rancangan Pergub
  Realisasi : 15 Pergub

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Penyusunan Peraturan Gubernur Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar.

  Maksud dan Tujuan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dimaksudkan dalam rangka mengimplementasikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan tujuannya agar perangkat daerah provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat berjalan dengan lancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 91.447.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.937.000,00 atau 96,08 %.

  Dalam kegiatan ini telah ditetapkannya 15 (lima belas) Peraturan Gubernur Perubahan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu : Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalbar, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, Dinas Perkebunan Prov. Kalbar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar, Dinas Sosial Prov. Kalbar, Dinas Kehutanan Prov. Kalbar, Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalbar.

- Untuk indikator : Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian organisasi Perangkat Daerah melalui fasilitasi, asistensi, monitoring dan evaluasi..
  Target : 14 Kabupaten/Kota
  Realisasi : 14 Kabupaten/Kota

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Pembinaan dan pengendalian Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar.

  Maksud dan Tujuan pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pembentukan susunan perangkat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 89.412.000,00 atau 99,03 %.

  Dalam kegiatan ini telah dilaksanakan penugasan pejabat struktural/staf ke seluruh Kabupaten/Kota daerah dalam rangka menggali informasi guna penyusunan dan perumusan kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

- Untuk indikator : Jumlah peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi Se Kalbar.
  Target : 80 Peserta
  Realisasi : 80 Peserta

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi Se Kalbar.

  Maksud diadakannya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah untuk menyamakan persepsi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dibidang organisasi.

Tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Teknis ini adalah agar tercipta sinkronisasi kebijakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan aparatur, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 92.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 82.098.000,00 atau 88,97 %.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sekadau pada tanggal 18 s.d 20 April 2018. Adapun hasil dari kegiatan ini Laporan tantang pelaksanaan kegiatan berupa :

a. Terinventarisirnya berbagai permasalahan dibidang organisasi.
b. Tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan dibidang organisasi.
c. Terciptanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penataan organisasi.

- Untuk indikator : Koordinasi penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
  Target : 1 Laporan
  Realisasi : 1 Laporan

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Koordinasi Penataan Perangkat Daerah.

  Maksud dan tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, regional dan daerah dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, efektif dan efisien dengan tujuan terwujudnya penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam penataan organisasi perangkat daerah.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 79.357.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 78.278.900,00 atau 98,64 %.

  Dengan dilaksanakannya kegiatan ini telah tersusun suatu laporan hasil koordinasi penataan kelembagaan perangkat daerah. Hasil laporan tersebut antara lain terciptanya persamaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka menindaklanjuti permasalahan-permasalahan di bidang organisasi. Selanjutnya adanya arahan dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi yang berkaitan dengan bidang organisasi antara pusat dan daerah.

- Untuk indikator : Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Kelembagaan UPT di lingkungan Prov. Kalbar.
  Target : 1 Laporan
  Realisasi : 1 Laporan

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kelembagaan UPT di lingkungan Provinsi Kalbar.

  Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah dalam rangka penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dipandang perlu melakukan monitoring evaluasi tugas pokok pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.432.500,00 atau 98,97 %.

  Hasil kegiatan yang dilakukan adalah tersedianya data dan informasi berkaitan dengan hasil monitoring dan evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dan laporan hasil monitoring dan evaluasi tugas pokok dan fungsi UPT di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada perbandingan tabel berikut :

TABEL 3.1.1
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
SELAMA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018
SASARAN 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2019
			2016	2017	2018	
1.	Tertatanya lembaga perangkat daerah yang proporsional, dinamis, responsif dan akuntabel serta ter-wujudnya organisasi Perangkat Daerah Kab/ Kota sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi agar tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1 Perda	1 Perda	1 Perda	10 Perang-kat Daerah
		2. Jumlah data susunan Perangkat Daerah Kabu-paten/ Kota	14 kab/ kota	14 kab/ kota	14 kab/ kota	14 kab/ kota
		3. Jumlah data dan laporan tentang pelaksanaan pe-ngembangan kapasitas	5 kali	5 kali	2 Provin si	-
		4. Jumlah rekomendasi hasil rakor bidang organisasi se-Kalbar	5 kali	5 kali	1 Rekom endasi	80 Peserta
		5. Jumlah Rancangan Pergub tentang Kelembagaan UPT Dinas/ Badan di Prov. Kalbar	5 kali	5 kali	3 kali	1 Pergub Cabdin
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	5 kali	5 kali	1 Lapo-ran	10 UPT
		7. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	5 kali	5 kali	1 Lapo-ran	1 Perda

Apabila diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN TARGET PADA RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2018			Target Renstra (2019)
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tertatanya lembaga perangkat daerah yang proporsional, dinamis, responsif dan akuntabel serta terwujudnya orga-nisasi Perangkat	1. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang di monitoring dan di evaluasi agar tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	1 Raperda	1 Raperda	100	1 Raperda
		2. Jumlah data susunan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100	14 kab/kota

	Daerah Kab /Kota sesuai dengan prin-sip koordinasi, integ-rasi, sinkronisasi dan simplikasi	3. Jumlah data dan laporan tentang pelaksanaan pe-ngembangan kapasitas	3kali	4 kali	100	1 kali
		4. Jumlah rekomendasi hasil rakor bidang organisasi se-Kalbar	3kali	4 kali	100	1 kali
		5. Jumlah Rancangan Pergub tentang Kelembagaan UPT Dinas/ Badan di Prov. Kalbar	3kali	4 kali	100	1 kali
		6. Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	3kali	4 kali	100	1 kali
		7. Jumlah Kebijakan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	3kali	4 kali	100	1 kali

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

Masih belum ditetapkannya beberapa Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi sebagai pedoman dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah secara optimal.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendalai tersebut, antra lain :

Melakukan koordinasi dengan Kementerian yang terkait dalam melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah

Sasaran 2 **:** ***"Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas".***

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 2 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, yang meliputi kegiatan :

a. Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.
b. Monitoring dan Evaluasi Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota.
c. Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan.
d. Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
e. Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.
f. Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.
g. Inovasi Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. **392.749.400,00** dengan realisasi sebesar ***Rp. 391.780.300,00*** atau ***99,75 %.***

Secara lebih rinci, pencapaian indikator sasaran tersebut, yaitu:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
2.	Meningkatnya sistem, prosedur dan standa-risasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta men-dorong penyelengga-raan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1. Jumlah SOP yang telah di review	20 SOP	20 SOP	100
		2. Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan evaluasi dibidang ketatalaksanaan	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100
		3. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan	1 Pergub	1 Pergub	100
		4. Persentase pencapaian penerapan SPM di Provinsi Kalbar	100%	100%	100
		5. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	100%	100
		6. Jumlah Kab/Kota yang di monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan publik	14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	35
		7. Jumlah inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Prov. Kalbar	11 Inovasi	11 Inovasi	100
	Niliai Capaian Sasaran Strategis				90,71

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ***"Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efsien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas."***

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***"Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pela-yanan publik yang terstandar dan berkualitas",*** mencapai ***90,71%*** atau dapat dikatagorikan ***"Sangat Berhasil".*** Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran 2, adalah :

- Untuk indikator : Jumlah SOP perangkat daerah yang telah di review.
  Target : 20 SOP
  Realisasi : 20 SOP
  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Prov. Kalbar.

Maksud diselenggarakannya Asistensi Standar Operasional Prosedur (SOP)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai upaya kongkrit perbaikanproses kinerja organisasi pemerintah yang akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta membantu perwujudan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif. Selain itu juga untuk membantu terbentuknya semangat profesionalisme dikalangan aparatur pemerintah.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana SOP yang telah dibuat atau disusun sesuai dengan Peraturan yang berlaku dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang dapat memberikan panduan bagi seluruh instansi Pemerintah Daerah khususnya instansi-instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintah.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 46.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 46.000.000,00 atau sebesar 100 %.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan asistensi penyusunan SOP, semua Perangkat Daerah mengikuti kegiatan tersebut. Namun hanya terdapat 20 (dua puluh) Perangkat Daerah yang sudah menyampaikan Draft SOP ke Biro Organisasi dan telah dikoreksi untuk selanjutnya dikembalikan ke Perangkat Daerah masing-masing untuk di perbaiki.

- Untuk indikator : Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring dan evaluasi dibidang ketatalaksanaan.
  Target : 4 Kab/Kota
  Realisasi : 4 Kab/Kota
  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota.

  Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi bidang Ketatalaksanaan adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan dibidang ketatalaksaan, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

  Tujuan dari monitoring dan evaluasi bidang Ketatalaksanaan ini adalah :

  a. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  b. Memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan peraturan - peraturan bidang ketatalaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.912.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 50.401.000,00 atau 99,00 %.

  Pelaksanaan Monev Penataan ketatalaksanaan dilakukan terhadap 4 (empat) Kabupaten/Kota. Monev dilakukan terhadap implementasi peraturan dibidang Ketatalaksanaan antara lain : Tata Naskah Dinas, Pakaian Dinas, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Ke-empat Kabupaten/Kota yang dilakukan Monev antara lain : Kab. Sekadau, Bengkayang, Landak dan Kab. Kayong Utara.

- Untuk indikator : Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan.
  Target : 1 Pergub
  Realisasi : 1 Pergub
  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman atau acuan mengenai Pengaturan penggunaan Pakaian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tercipta keseragaman dalam menggunakan pakaian Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.012.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. Rp. 70.981,700,00 atau 99,96 %.

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan bidang Ketatalaksanaantelah dilakukan beberapa kali pembahasanmelalui rapat Tim dan dari hasil pembahasan, telah ditetapkanPeraturan Gubernur Kalimantan BaratNomor 21 Tahun 2018tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negaradi lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- Untuk indikator : Persentase pencapaian penerapan SPM di Provinsi Kalbar
  Target : 100 %
  Realisasi : 100 %

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan Laporan Pencapaian Penerapan SPM dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah khususnya Daerah Provinsi Kalimantan Barat sehingga pada akhirnya terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya penerapan SPM di Daerah yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan Pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penerapan SPM adalah :

1. Memonitor perkembangan penerapan SPM di Provinsi Kalbar.
2. Memonitor perkembangan penerapan masing-masing bidang SPM di Provinsi Kalbar.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 51.079.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.711.800,00 atau 99,28 %.

Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalbar tahun 2017 adalah 53,75 %. Hal ini merupakan nilai dari penerapan SPM Pemprov yaitu 83,16 % dan nilai penerapan SPM Kabupaten/Kota yaitu 48,50 %.

2. Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik rapat teknis 6 bidang SPM maupun rapat teknis dengan menghasilkan masukan-masukan, saran dan pertanyaan terkait penyusunan laporan SPM Provinsi Kalbar Tahun 2017 Terdapat 6 Bidang SPM untuk Provinsi, yaitu Bidang Pendidian, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota juga terdapat 6 (enam) Bidang SPM yang menjadi dasar perhitungan pencapaian SPM. Dari hasil rapat fasilitasi penyusunan SPM telah tersusun dokumen laporan hasil penyusunan SPM untuk Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

- Untuk indikator : Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
  Target : 100 %
  Realisasi : 100 %

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.

  Maksud dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah :

  a. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
  b. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
  c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
  d. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga Masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

  Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini adalah:

  a. Mendorong dan memotivasi unit-unit pelayanan di Provinsi Kalimantan Barat agar selalu dapat menjaga dan meningkatkan fungsi pelayanannya kepada masyarakat, dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyaraka penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang ada pada unit yang bersangkutan;
  b. Data SKM dimaksud selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan, dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan demikian diharapkan kedepan kebijakan peningkatan pelayanan publik yang akan diambil dapat lebih berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

  Selain itu maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan penerapan SPM adalah :

  1. Memonitor perkembangan penerapan SPM di Provinsi Kalbar.
  2. Memonitor perkembangan penerapan masing-masing bidang SPM di Provinsi Kalbar.

  Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 57.974.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 57.887.200,00 atau 99,90 %.

  Hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Suevey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Sebanyak 52 (lima puluh dua) Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemprov Kalbar melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), atau sebanyak 48,60 % Unit Pelayanan Publik melaksanakan SKM. Nilai rata-rata SKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 82,49 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2016) yaitu 76,49 atau meningkat 6 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 diraih oleh UPT Museum dengan nilai 94,94 atau kategori Sangat Baik.

2. Adapun dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 12 (dua belas) Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan SKM Tahun 2017 kepada Gubernur Kalbar. Nilai rata-rata SKM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2017 adalah 80,33 atau kategori Baik. Nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya (Tahun 2016) yaitu 77,58 atau meningkat 2,75 poin. Nilai SKM tertinggi untuk Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Sintang dengan nilai 86,26 dan Kota Pontianak dengan nilai 82,81 atau kategori Baik. Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Provinsi Kalbar tahun 2017 adalah 81,41 dengan mutu pelayanan B (Baik). Hal ini merupakan nilai dari IKM Pemprov yaitu 82,49 dengan mutu pelayanan B (Baik) dan nilai IKM Kabupaten/Kota yaitu 80,33 dengan mutu pelayanan B (Baik).

- Untuk indikator : Jumlah Kab/Kota yang di monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan publik
  Target : 14 Kab/Kota
  Realisasi : 5 Kab/Kota

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar.

  Maksud dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah sebagai salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara benar serta untuk meningkatkan kinerja melalui inventarisasi data mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan publik, yang nantinya akan menjadi bahan pengambilan kebijakan menuju terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

  Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelayanan publik ini untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberikan dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit kerja dilingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.008.000,00 atau 100%.

  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten/Kota antara lain Kota Singkawang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Landak.

- Untuk indikator : Jumlah inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Prov, Kalbar
  Target : 11 Inovasi
  Realisasi : 11 Inovasi

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Inovasi Pelayanan Publik.

  Maksud dan tujuan dari kegiatan Inovasi Pelayanan Publik adalah :
  1. Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik.
  2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik.
  3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 87.790.600,00 dengan reaalisasi sebesar Rp. 87.790.600,00 atau 100%.

Hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kalbar pada tahun 2018 yang diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2018 adalah sejumlah 35 inovasi dengan rincian 11 inovasi berasal dari Pemprov dan 24 inovasi berasal Kabupaten/Kota. Salah satu inovasi tersebut yang berasal dari dari Kabupaten Sanggau, yaitu inivasi Posduren (Posyandu Remaja entikong) berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2018, menyusul prestasi Pemprov dan Kota Pontianak yang pada tahun 2017 berhasil meraih Top 40.
2. Inovasi Posduren (Posyandu Remaja entikong) dari Puskesmas Entikong Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, berhasil meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Indonesia Tahun 2018, menyusul prestasi Pemprov dan Kota Pontianak yang pada tahun 2017 berhasil meraih Top 40..

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada perbandingan tabel berikut :

TABEL 3.2.1
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
SELAMA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018
SASARAN 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2019
			2016	2017	2018	
1.	Meningkatnya sis-tem, prosedur dan standarisasi keta-talaksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraa n pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan	1 kebija kan	1 kebija kan	1 kebija kan	1 kebija-kan
		2. Jumlah UPP yang melaksa-nakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	15 UPP Pem-prov dan Pem-kab/ kota	50 UPP Pem-prov dan Pem-kab/ kota	15 UPP Pem-prov dan Pemk ab/ kota	15 UPP Pem-prov dan Pemkab/ kota
		3. Jumlah Kab/kota yang di-laksanakan kegiatan Monev penataan ketatalaksanaan	6 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	4 Kab/ Kota	4 Kab/Kota
		4. Jumlah SKPD yang me-nyusun SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	75%	75%	100%	100%
		5. Laporan SKPD Pengampu SPM dilingkungan Peme-rintah Prov. Kalbar	1 doku-men	1 Doku-men	1 doku-men	1 doku-men
		6. Jumlah SKPD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring penyelengga-raan pelayanan publiknya	10 Kab/ kota	6 Kab /kota	5 Kab/ Kota	5 Kab/Kota
		7. Jumlah UPP yang melakukan inovasi pelayanan	6 UPP	10 UPP	11 UPP	11 UPP

Apabila diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2.2

PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN TARGET PADA RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2018			Target Renstra (2019)
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya sistem, prosedur dan stándarisasi ketata-laksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas					
		1. Jumlah kebijakan bidang ketatalaksanaan yang dihasilkan	1 kebija-kan	1 kebi-jakan	100	1 kebijakan
		2. Jumlah UPP yang melaksa-nakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	10 UPP Pemprov dan Pemkab/ kota	50 UPP Pem-prov dan Pem-kab/ kota	100	3 UPP Pem-prov dan Pem kab/kota
		3. Jumlah Kab/kota yang di-laksanakan kegiatan Monev penataan ketatalaksanaan	10 Kab/ kota	6 Kab/ Kota	100	14 Kab/ kota
		4. Jumlah SKPD yang me-nyusun SOP dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 doku-men	1 doku-men	100	1 doku-men
		5. Laporan SKPD Pengampu SPM dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	20 SKPD	20 SKPD	100	14 kab/kota
		6. Jumlah SKPD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring penyelenggara-an pelayanan publiknya	10 Kab/ kota	6 Kab/ kota	100	14 Kab/ kota
		7. Jumlah UPP yang melakukan inovasi pelayanan	10 UPP	10 UPP	100	10 UPP

Dilihat dari Renstra Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2013-2018, untuk tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

a. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di SKPD yang melayani langsung ke masyarakat.
b. Belum semua SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
c. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanan dalam pengimplementasian Peraturan, anatara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
d. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendalai tersebut, antra lain :

a. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
b. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
c. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
d. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing–masing SKPD.

Sasaran 3 : "Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS dan Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan sumberdaya aparatur setda, serta pemanfaatan perpustakaan setda".

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur, yang meliputi kegiatan :

a. Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar.
b. Asistensi Formasi PNS.
c. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional.
d. Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Prov. Kalbar
e. Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar
f. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan se-Kalbar
g. Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar.
h. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda.
i. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda.
j. Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.

Alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 741.346.225,00 dengan realisasi sebesar Rp. 735.046.800,00 atau 99,15 %.

Secara lebih rinci, pencapaian indikator sasaran tersebut, yaitu:

Tabel 3.3

Pencapaian Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	(%)
3	Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, ter-sedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Re-formasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya	1. Jumlah dokumen Formasi PNS	15 Dokumen	13 Dokumen	98.05
		2. Jumlah Unit Kerja yang diasistensi dalam penyusunan formasi PNS	113 Unit Kerja	113 Unit Kerja	100
		3. Jumlah dokuemn jabatan fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4. Jumlah dokumen ABK perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar	5 Dokumen	6 Dokumen	100

	aparatur setda, meningkatnya kua-litas pelayanan dan pe-manfaatan minat baca serta pemanfaatan perpus-takaan setda	5. Jumlah unit kerja yang menyampaikan dokumen analisis jabatan di lingkungan Pemprov. Kalbar	10 Dokumen	14 Dokumen	100
		6. Jumlah Kab/Kota yang menyusun analisis jabatan	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100
		7. Persentase jumlah aparatur penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah yang terlatih	70%	70%	100
		8. Pembinaan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) PNS di lingkungan Setda Prov.Kalbar	1 Tahun	1 Tahun	100
		9. Jumlah administrasi kepegawaian yang telah diverifikasi	100%	100%	100
		10. Jumlah pengunjung yang dating ke perpustakaan setda	350 orang	350 orang	100
	Niliai Capaian Sasaran Strategis				**99,80**

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi ***"Mewujudkan pendayagunaan aparatur secara sistemik"***

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***"Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpustakaan setda",*** mencapai ***99,80 %*** atau dapat dikatagorikan ***"Sangat Berhasil".*** Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran 3, adalah :

- Untuk indikator : Jumlah dokumen Formasi PNS
  Target : 15 Dokumen
  Realisasi : 13 Dokumen
  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :
  Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar.
  Maksud dilaksanakan Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 adalah untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan dalam perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
  Tujuan dilaksanakannya Penyusunan Formasi PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah agar Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan

tanggung jawab masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 91.100.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.034.350,00 atau 99,93 %.

Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1) Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Formasi PNS di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2018; 2) Menyusun data profil Daerah Kalbar Tahun 2018; 3) Menyusun rekapitulasi data Kelembagaan dan Data Bezetting Kepegawaian; 4) Menyusun Data Guru dan Data Kesehatan; 5) Menyiapkan Surat Gubernur Kalimantan Barat tentang usulan Formasi PNS Tahun 2018; 6) Melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota yang dlaksanakan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Sintang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

Rekapitulasi terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan penyusunan Formasi PNS berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 890/0135/OR-C tanggal 4 Januari 2018 hal Penyusunan Formasi PNS Tahun 2018 adalah **Kabupaten Bengkayang** dan **Kabupaten Kubu Raya.**

Selain melakukan penyusunan formasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi e-formasi walaupun, pada Tahun ini tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena tidak didukung oleh anggaran sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran database pada aplikasi e-formasi sehingga untuk data terkait jumlah sekolah SMA dan SMK serta kebutuhan guru belum terkini/*up to date*

- Untuk indikator : Jumlah Unit Kerja yang diasistensi dalam penyusunan formasi PNS
  Target : 113 Unit Kerja
  Realisasi : 113 Unit Kerja

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Asistensi Formasi PNS.

  Maksud dilaksanakannya kegiatan Asistensi Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yaitu untuk memberikan bimbingan teknis kepada Pejabat pengawas/Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang membidangi kepegawaian/aparatur di masing-masing OPD sehingga dapat menyusun formasi PNS berdasarkan formulir penyusunan Formasi PNS mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.

  Sedangkan Tujuannya adalah :

  a. Menambah pengetahuan dan keterampilan peserta tentang penyusunan formasi PNS;

  b. Mendorong OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pemutakhiran data pada aplikasi E-Formasi.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 99.985.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp. 99.985.000,00,00 atau 100 %.

  Peserta Kegiatan Asistensi Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 terdiri dari Para Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional yang membidangi kepegawaian/aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- Untuk indikator : Jumlah dokumen formasi Jabatan Fungsional
  Target : 1 Dokumen
  Realisasi : 1 Dokumen

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Penyusunan formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Kalbar.

  Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan, jabatan fungsional yang telah ditetapkan Menpan-RB sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta

memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai salah satu persyaratan pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar baik melalui mekanisme pengangkatan pertama, alih jabatan, maupun *inpassing*.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 27.164.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 27.164.350,00 atau 100%.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Pelaksana.
b. Berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait nomenklatur jabatan fungsional yang terbaru.
c. Menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja mengenai jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB dan meminta agar menyampaikan usulan pengisian jabatan fungsional.
d. Menyampaikan formasi beberapa jabatan fungsional ke instansi pembina sesuai dengan surat yang disampaikan instansi pembina kepada Pemerintah Prov. Kalbar

Pelaksanaan Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan untuk Formasi Jabatan fungsional yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai tahun 2019 sejumlah 175 jenis jabatan fungsional..

- Untuk indikator : Jumlah dokumen ABK Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar
  Target : 5 Dokumen
  Realisasi : 6 Dokumen

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Prov. Kalbar.

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi dan mendorong penyusunan dokumen ABK serta memverifikasi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalbar mempunyai dokumen ABK yang menunjukkan jumlah yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.492.775,00 dengan realisasi sebesar Rp. 82.492.775,00 atau 100,38%

Tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Persiapan

   Pembentukan Tim Penyusunan Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengumpulan Data

   Pengumpulan Data dalam kegiatan ini dengan mengirimkan surat kepada Perangkat Daerah dan UPT dengan menyusun dokumen ABK berpedoman dengan peraturan yang berlaku

c. Tahapan Verifikasi Data

   Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Biro Organisasi yaitu:

   1) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
   2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
   3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
   4) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
   5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat

6) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

d. Tahapan Penetapan Dokumen ABK (Keputusan Gubernur Kalimantan Barat)
   1) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
   2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

- Untuk indikator : Jumlah Dokumen ANJAB yang disampaikan
  Target : 10 Dokumen
  Realisasi : 14 Dokumen

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan

  Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Prov. Kalbar

  Makksud dan Tujuan dari pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

  1. Untuk membantu dan memudahkan unit kerja dalam melaksanakan analisis jabatan sesuai dengan format-format data serta langkah-langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan.
  2. Sebagai bahan masukan bagi unit kerja dalam melakukan penataan kepegawaian serta bagi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana.
  3. Untuk memberikan kejelasan tentang tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang masing-masing pemegang jabatan baik struktural maupun non struktural guna peningkatan profesionalisme dan kinerja

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 97.380.789,00 atau 97 %

  Peran Tim Pelaksana Asistensi dan verifikasi Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Bara dimulai dari Verifikasi Jabatan hingga penetapan hasil draft Analisis Jabatan yang disusun oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sempurna.

  Hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim dibahas dalam rapat tim untuk permasalahan dan solusi yang diberikan dalam penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah maupun unit pelaksana teknis yang dilaksanakan pada :

  - Hari Senin, Tanggal 9 April 2018, membahas hasil verifikasi analisis jabatan pada UPT Latihan Kerja Industri, UPT PPD Singkawang, UPT PPD Sekadau, UPT PPD Putussibau, UPT PPD Sintang, UPT PPD Pontianak Wilayah II Pontianak, UPT PPD Mempawah, UPT PPD Ketapang, UPT PPD Kayong, UPT PPD Bengkayang.
  - Hari Kamis, Tanggal 3 Mei 2018, membahas hasil verifikasi analisis jabatan pada UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, UPT Pengawas dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - Hari Jumat, Tanggal 6 Juli 2018, membahas hasil verifikasi analisis jabatan pada UPT Balai Benih Induk Hortikultura, UPT TeknologiInformasi Dan KomunikasiPendidikan, UPT Pendidikan Dan PelatihanPertanianProvinsi Kalimantan Barat, UPT Pelabuhan Perikanan, Biro Perekonomian dan UPT Pengawas Dan Sertifikasi Benih

- Untuk indikator : Jumlah Kab/Kota yang menyusun Analisis Jabatan
  Target : 13 Kab/Kota
  Realisasi : 13 Kab/Kota

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan

  Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan se-Kalbar

  Maksud dari kegiatan ini adalah menciptakan suatu pelaksanaan Analisis Jabatan yang berkualitas untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.

  Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menemukan hambatan dalam penyusunan analisis jabatan di Kabupaten/Kota;
b. Memberi kesempatan kepada pejabat di Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran terhadap efektivitas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan;
c. Memberikan masukan dan umpan balik untuk perencanaan kegiatan penyusunan Analisis Jabatan selanjutnya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.967.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 66.677.700,00 atau 99,57 %.

Monitoring dan evaluasi penyusunan analisis jabatan memfokuskan pada jumlah analisis jabatan yang sudah disusun oleh perangkat daerah dengan menyebarkan kuesioner maupun wawancara kepada pejabat di Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten/Kota. Unsur-unsur yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain :

a. Jumlah OPD yang ada di Kab/Kota
b. Jumlah OPD yang telah menyusun dan menyampaikan Dokumen Analisis Jabatan ke bagian organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru
c. Waktu yang diperlukan OPD dalam menyusun Dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 bulan
   - 1 – 3 bulan
   - 3 bulan
d. Waktu yang diperlukan OPD dalam menyempurnakan Dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 bulan
   - 1 bulan
   - > 1 bulan
e. Jumlah Dokumen Analisis Jabatan yang telah diverifikasi oleh bagian Organisasi
f. Hasil Verifikasi Dokumen Analisis Jabatan :
   - Banyak Terdapat Koreksi/Tidak Sesuai dengan pedoman penyusunan
   - Sedikit Koreksi
   - Tidak ada koreksi
g. Waktu yang diperlukan untuk memverifikasi 1 dokumen Analisis Jabatan :
   - < 1 minggu
   - 1 – 4 minggu
   - > 4 minggu
h. Jumlah OPD yang Dokumen Analisis Jabatan telah ditetapkan melalui keputusan Bupati/Walikota
i. Kendala yang dihadapi OPD dalam menyusun Dokumen Analisis Jabatan
j. Kendala yang dihadapi dalam memverifikasi dokumen Analisis Jabatan
k. Solusi yang diberikan oleh bagian organisasi dalam menghadapi kendala penyusunan OPD.

Adapun Kabupaten/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi adalah Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang

- Untuk indikator : Persentase jumlah aparatur penyusunan analisis jabatan pada perangkat daerah yang terlatih

Target : 70 %
Realisasi : 70 %

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan

Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar

Maksud dari kegiatan ini adalah menciptakan suatu pelaksanaan Analisis Jabatan yang berkualitas untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menemukan hambatan dalam penyusunan analisis jabatan di Kabupaten/Kota;
2. Memberi kesempatan kepada pejabat di Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk menyumbangkan pemikiran dan saran-saran terhadap efektivitas pelaksanaan penyusunan Analisis Jabatan;
3. Memberikan masukan dan umpan balik untuk perencanaan kegiatan penyusunan Analisis Jabatan selanjutnya.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 97.244.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.664.000,00 atau 98,38 %.

Pelaksanaan Kegiatan Workshop Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu dari tanggal 19 s.d. 20 Juli 2018 dari pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Hotel Kini Komplek Nusa Indah, Jalan Nusa Indah III, Pontianak.

Jadwal pelaksanaan Workshop Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didahului dengan laporan ketua panitia pelaksana dan diikuti dengan pidato Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum sekaligus membuka secara resmi Workshop Analisis Jabatan.

Peserta Workshop Analisis Jabatanini berasal dari OPD di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat berjumlah 109 orang dengan rincian sebagai berikut :

Provinsi : 72 Orang
Kabupaten/Kota : 37 Orang

Pada Workshop Analisis Jabatan ini disampaikan materi antara lain :

a. Materi penataan sumberdaya manusia aparatur yang meliputi Implementasi Manajemen ASN di Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang di wakili oleh Asisten Administrasi dan Umum, Ibu Dra. Marlyna, M.Si.
b. Penyusunan Analisis Jabatan yang meliputi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan disampaikan oleh Kabid Pengembangan Kompetensi ASN KemenpanRB, Bapak Drs. Supardiyana
c. Implementasi penyusunan Analisis Jabatan, ABK dan Evaluasi Jabatan di Provinsi Kalimantan Barat disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dra. Yunda Rochaningsih.
d. MateriPenyusunan Standar Kompetensi Jabatan disampakian oleh Kabid Pengembangan Kompetensi ASN KemenpanRB, Bapak Drs. Supardiyana.

- Untuk indikator : Pembinaan jasmani PNS melalui kegiatan SKJ PNS di lingkungan Setda Prov. Kalbar

Target : 1 Tahun
Realisasi : 1 Tahun

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda

Maksud dan Tujuan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani adalah untuk mewujudkan dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani PNS sehingga pada gilirannya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Di samping itu juga akan terbangun Solidaritas Sosial di kalangan PNS yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan efektifitas kinerja secara optimal.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.192.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 59.112.250,00 atau 98,21 %.

Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungn Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro. Kegiatan yang dilakukan berupa Senam Kesegaran jasmani (SKJ) yang diikuti seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar yang

dilaksanakan setiap hari Jum'at mulai pukul 07.00 s.d 08.00 wiba bertempat di Halaman Komplek kantor Gubernur Kalbar.

Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pembinaan Jasmani PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar pada program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur :

1. Memberikan motivasi, kreativitas kepada PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar dalam berolahraga khususnya senama kesegaran jasmani dan olahraga lainnya
2. Menjaga kebugaran dan kesehatan dengan berolahraga
3. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- Untuk indikator : Jumlah administrasi kepegawaian yang telah diverifikasi
  Target : 100 %
  Realisasi : 100 %

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan

  Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda

  Maksud dan tujuan terkait dengan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Kalbar agar terciptanya pengelolaan dan penataan administrasi yang baik serta pegawai dapat melakukan pekerjaan lebih efisien, Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara propesional dengan didasari kepribadian, etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi/organisasi serta terciptanya tertib administrasi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

  Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.568.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.483.000,00 atau 97,05 %.

  Sasaran kegiatan adalah seluruh PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalbar yang mencakup 9 (sembilan) Biro.

  Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PNS di lingkungan Setda Provinsi Kalbar selama tahun 2018 adalah :

  1. Kenaikan Gaji berkala berjumlah : 174 orang
  2. Kenaikan Pangkat berjumlah 66 orang, terdiri dari :
     - Periode April 2018 berjumlah 39 orang
     - Periode Oktober 2018 berjumlah 27 orang
  3. Cuti PNS berjumlah 120 orang terdiri dari :
     - Cuti besar 6 orang
     - Cuti alasan penting 7 orang
     - Cuti tahunan 98 orang
     - Cuti sakit 5 orang
     - Cuti bersalin 2 orang
  4. Ijin Belajar PNS, teridir dari :
     - S1 sebanyak 1 orang
     - S2 sebanyak 1 orang
  5. Mutasi masuk berjumlah 15 orang
  6. Mutasi keluar instansi berjumlah 12 orang
  7. Mutasi antar Biro 7 orang
  8. Usulan pensiun berjumlah : 21 orang, terdiri dari :
     - Batas usia Pensiun : 19 orang
     - Pensiun Dini : 1 orang
     - Pensiun meninggal : 1 orang

- Untuk indikator : Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan
  Target : 350 orang
  Realisasi : 350 orang

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar.

Maksud dan tujuan adalah dalam rangka lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp. 67.408.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 67.033.800,00 atau 99,44 %.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

a. Menghimpun dan menata buku bahan koleksi Perpustakaan.
b. Melakukan penyimpanan pelestarian bahan pustaka terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan dari jaman penjajahan Belanda tahun 1916, Surat Kabar Akcaya dari tahun 1977-1999, Surat Kabar Pontianak Post dari tahun 2000-2018.
c. Mengolah data Buku Perpustakaan sesuai dengan Klarifikasinya berjumlah 732.090 buku.
d. Menjilid bahan pustaka yang rusak sebanyak 35 buku
e. Menjilid Majalah /Koran :
   - Trubus bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Tempo bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Gatra bulan Januari sampai dengan Desember 2018 = 1 buku
   - Koran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 = 4 buku
f. Melayani pengunjung Perpustakaan dari bulan Januari sampai dengan Desember sebanyak 350 orang terdiri dari : Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar; Pegawai dari Luar Instansi; Mahasiswa; Pelajar; Masyarakat.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada perbandingan tabel berikut :

TABEL 3.3.1
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
SELAMA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018
SASARAN 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2019
			2016	2017	2018	
1.	Terwujudnya pembina-an aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsio-nal, tersedianya infor-masi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi serta mening-katnya kualitas sum-berdaya aparatur setda, meningkatnya kualitas pelayanan dan peman-faatan minat baca serta pemanfaatan	1. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan Setda	750 org	124 org	750 org	750 org
		2. Prosentase peningkatan layanan Perpustakaan Setda melalui penyediaan buku-buku bacaan elektronik (e-book)	-	80%	100 %	100 %
		3. Tersedianya susunan Formasi Jabatan Fungsional seluruh Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		4. Tersedianya usulan formasi PNS Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

	perpus-takaan setda	5. Jumlah dokumen Analisis Ke-butuhan Diklat (AKD) Perang-kat daerah Pemerintah Provinsi yang dievaluasi	42 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
		6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan refor-masi birokrasi di Provinsi Kal-bar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		7. Jumlah tenaga análisis penyu-sunan ANJAB, ABK dan EVJAB yang mengikuti Workhsop	84 org	84 org	84 org	84 org
		8. Jumlah Dokumen ANJAB SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	15 SKPD
		9. Jumlah Dokumen EVJAB SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	44 SKPD	15 SKPD	15 SKPD
		10. Jumlah Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah prov. Kalbar yang dikelola admi-nistrasi kepegawaiannya	450 org	480 org	450 org	450 org
		11. Prosentase peningkatan kesehatan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dilingkungan Setda	100 %	100 %	100 %	100 %

Apabila diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3.2
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN TARGET PADA RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2018			Target Renstra (2019)
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pem-binaan aparatur for-masi PNS, Jabatan Fungsional, tersedia-nya informasi jaba-tan, informasi diklat dan	1. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan Setda	750 org	750 org	100	750 org
		2. Prosentase peningkatan layanan Perpustakaan Setda melalui penyediaan buku-buku bacaan elektronik (e-book)	80%	80%	100	80%

	Reformasi Biro-krasi serta mening-katnya kualitas sum-berdaya aparatur set-da, meningkatnya kualitas pelayanan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan perpus-takaan setda	3. Tersedianya susunan Formasi Jabatan Fungsional seluruh Perangkat daerah dilingkun-gan Pemerintah Prov. Kalbar	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
		4. Tersedianya usulan formasi PNS Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
		5. Jumlah dokumen Analisis Ke-butuhan Diklat (AKD) Perang-kat daerah Pemerintah Provinsi yang dievaluasi	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen
		6. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan refor-masi birokrasi di Provinsi Kal-bar	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
		7. Jumlah tenaga análisis penyu-sunan ANJAB, ABK dan EVJAB yang mengikuti Workhsop	84 org	84 org	100	84 org
		8. Jumlah Dokumen ANJAB SKPD di lingkungan Peme-rintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	15 SKPD	100	15 SKPD
		9. Jumlah Dokumen EVJAB SKPD dilingkungan Peme-rintah Prov. Kalbar yang disusun	15 SKPD	44 SKPD	100	15 SKPD
		10. Jumlah Pegawai diling-kungan Sekretariat Daerah prov. Kalbar yang dikelola administrasi kepegawaiannya	450 org	480 org	100	450 org
		11. Prosentase peningkatan ke-sehatan jasmani PNS melalui kegiatan Senam Kesegaran Jasmani dilingkungan Setda	100%	100%	100	100%

Sasaran 4 **:** ***"Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance".***

Upaya-upaya untuk mencapai sasaran 4 tersebut di atas, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2017.
b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2018.

c. Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov Kalbar Tahun 2017.
d. Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sebesar ***Rp. 249.698.775,00*** dengan realisasi sebesar ***Rp. 184.712.800,00*** atau ***73,97 %.***

Secara lebih rinci, pencapaian indikator sasaran tersebut, yaitu:

Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	%
1.	Terwujudnya sistem Akun-tabilitas kinerja Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance	1. Jumlah Laporan Kinerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
		2. Jumlah Perjanjian Kerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
		3. Persentase perangkat daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik dan benar	75%	75%	100
		4. Persentase perangkat daerah yang menyusun cascading kinerja perangkat daerah	95%	70%	73,68
	Niliai Capaian Sasaran Strategis				93,42

Sasaran ini ditujukan untuk mencapai misi **"Mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka terwujudnya *Good Local Governanve*"**

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran ***"Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam terwujudnya Good Local Governance",*** mencapai ***93,75%*** atau dapat dikatagorikan ***"Sangat Berhasil".*** Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran 4, adalah :

- Untuk indikator : Jumlah Laporan Kinerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu
  Target : 1 Laporan
  Realisasi : 1 Laporan
  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :
  Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Prov. Kalbar Tahun 2017.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini adalah melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan dan sejauhmana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai wujud komitmen Kepala Daerah dan segenap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.583.325,00 dan realisasi sebesar Rp. 72.797.350,00 atau 96,31%.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja sesuai rekomendasi yang disampaikan Kementerian PAN dan RB atas evaluasi laporan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 yang lalu

Selanjutnya, pada tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat **telah men-*design* satu sistem aplikasi untuk pengumpulan data kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPD Pemprov Kalbar** yang telah di*launching* pada bulan April 2015. Aplikasi dimaksud juga merupakan upaya monitoring pencapaian Perjanjian Kinerja secara berkala dengan menggunakan sistem monitoring yang terintegrasi yang **turut direkomendasikan oleh Menpan dan RB**.

Laporan Kinerja yang disusun ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Menpan dan RB atas evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2017, telah dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini sedang melakukan revisi terhadap dokumen RPJMD agar setiap sasaran strategis terdapat indikator kinerja utama yang berkualitas *outcome;*
2. Telah menselaraskan IKU yang berlaku di Lingkungan Pemprov dengan IKU tingkat OPD;
3. Telah mengupayakan peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja pada OPD Pemprov, antara lain menjelaskan capaian IKU.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan pada Laporan Kinerja Pemprov dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017 yang mengacu pada dokumen RPJMD, RKPD dan perjanjian kinerja Tahun 2017 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

- Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Porsentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjankin dengan Baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 75% karna baru 28 Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan yang berlaku.
- Indikator output dari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Dokumen Laporan Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2017 dengan target 1 dokumen dan capaian indikator tersebut 1 dokumen atau sebesar 100%.

- Untuk indikator : Jumlah Perjanjian Kerja Pemprov Kalbar yang disusun dan disampaikan tepat waktu
  Target : 1 Laporan
  Realisasi : 1 Laporan

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar

  Maksud dan tujuan dilaksanakannya Penyusunan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Pemprov Kalbar adalah untuk menindaklanjuti Diktum Ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Perjanjian kinerja dimaksud merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan Penyusunan Perjanjian kinerja itu sendiri yaitu :

  1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
  2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
  3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
  4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
  5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai**.**

  Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 54.915.450,00 dengan realisasi sebesar Rp. 54.915.450,00 atau 100 %.
  Hasil pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

  - Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan perubahan Indikator Kinerja Daerah sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 menggunakan Indikator Kinerja Daerah yang setelah perubahan.
  - Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 memiliki 18 (delapan belas) sasaran strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 diserahkan ke Kementerian pada satu bulan setelah DPA di tetapkan.
  - Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 telah disampaikan ke Kementerian PAN & RB pada tanggal 29 Maret 2018.
  - Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen RPJMD Prov. Kalbar Periode 2013-2018, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 642/Or/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 396/Or/2014 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
  - Apabila terdapat perubahan APBD Tahun 2018 maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan perubahan sesuai dengan APBD yang terbaru.
  - Terdapat kendala saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu terdapat beberapa anggaran UPT yang masih belum ditetapkan di dalam ADBP Prov. Kalbar sehingga menghambat penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut juga menyajikan anggaran seluruh UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
  - Indikator hasil dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Porsentase SKPD Pemprov yang menyusun Perjankin

dengan Baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 80 % yaitu sebesar 29 Perangkat Daerah.

- Indikator output dari kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja Pemprov. Kalbar Tahun 2018 dengan target kinerja 1 dokumen dan capaian indikator tersebut sebesar 1 dokumen Laporan Kegiatan.

➢ Untuk indikator : Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik dan benar
Target : 75 %
Realisasi : 75 %

Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov. Kalbar.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan strategi umum Tahun 2018 di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.
2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja
3. Memfasilitasi penyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 36.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.400.000,00 atau 100 %.

1. Pelaksanaan Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemprov Kalbar dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018. Peserta asistensi meliputi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017 disampaikan paling lambat tanggal 2 Februari 2018 dan seluruh Perangkat daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2017 kepada Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar.
3. Substansi Reviu atas hasil asistensi LKj dan Perjankin Perangkat Daerah terdiri dari :
   - Format (Daftar Isi) dan kelengkapan LKj dan Perjankin Perangkat Daerah;
   - Kualitas dan Kedalaman Berakuntabilitas dalam Isi dan Substansi LKj.
   - Penyajian Data Umum Kinerja Makro
   - Termasuk Ketepatan Waktu Penyampaian LKj
4. Pelaksanaan Reviu atas hasil asistensi LKj dan Perjankin Perangkat Daerah Tahun 2018 :
   - Reviu dilakukan terhadap LKj dan Perjankin Perangkat Daerah.
   - Reviu dilakukan dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey” yaitu survey berdasarkan kriteria dengan menggunakan yes/no question terhadap kriteria.
   - Kriteria tersebut merupakan ketentuan-ketentuan dan *best practice* yang harus disajikan dalam LKj
5. Output dari kegiatan ini yaitu berupa Laporan Hasil Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sebanyak 2 dokumen.
6. Indikator hasil dari kegiatan asistensi ini yaitu Persentase Perangkat Daerah Pemprov. Kalbar yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dengan baik dengan target 75% dan capaian indikator tersebut sebesar 75% yaitu baru 28 Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- Untuk indikator : Persentase perangkat daerah yang menyusun cascading kinerja perangkat daerah

  Target : 95 %

  Realisasi : 70 %

  Dalam mencapai target indikator dilakukan kegiatan :

  Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

  Maksud dan tujuan dilaksanakannya **Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah** yaitu :

  1. Sebagai salah satu kegiatan penunjang untuk meningkatan Predikat Nilai SAKIP Pemprov Kalbar dari nilai "B" menjadi "BB".
  2. Sebagai pedoman sasaran dan indikator kinerja di dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

  Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 82.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.600.000,00 atau 24,88 %.

  a. Rencana awal kegiatan **Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah** dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 September 2018 bertempat di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Akan tetapi sehubungan dengan kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB di Hotel Mercure Pontianak pada tanggal 24 s/d 25 September 2018, sehingga kegiatan Workshop ini dialihkan ke Hotel Mercure Pontianak, dikarenakan Narasumber merupakan tim Evaluator Kementerian PAN dan RB dan peserta kegiatan Workshop ini juga merupakan peserta Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN dan RB.
  b. Peserta Kegiatan Workshop Penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah ini terdiri dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro Setda Prov. Kalbar, Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Sub Bagian Renja/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  c. Para peserta yang hadir diminta untuk membawa Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah beserta Laptop.
  d. Output Kegiatan *Workshop* Penyusunan *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah yaitu : Dokumen *Cascading* (Penjabaran Kinerja) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sedangkan indikator *outcome*nya yaitu persentase Perangkat Daerah yang menggunakan *Cascading* Kinerja sebagai pedoman dokumen perencanaan.
  e. Setiap sasaran pembangunan (*impact*), indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat Pemerintah Daerah (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat OPD (Renstra atau Renja OPD) berupa sasaran stategis (*outcome-impact),* indikator kinerja dan target.
  f. Setiap sasaran strategis (*outcome-impact*), indikator kinerja dan target OPD, dijabarkan ke dalam sasaran program (yang tergambar dalam *outcome),* indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 2 di bawahnya.
  g. Setiap sasaran program (*outcome*) unit organisasi eselon 2, dijabarkan (*cascading)* ke dalam sasaran kegiatan (*output),* indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing unit organisasi eselon 3/unit kerja mandiri di bawahnya.
  h. Setiap sasaran kegiatan (*output*) digunakan dasar untuk merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan *output*.
  i. Penjabaran (*cascading)* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality)*, serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*).
     - Indikator hasil dari kegiatan Workshop Cascading ini yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Cascading Kinerja sebagai pedoman dokumen perencanaan dengan target 95% dan capaian indikator tersebut sebesar 70 % atau sebanyak 26 Perangkat Daerah.

- Indikator output dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Cascading kinerja Pemprov Kalbar yang disusun dengan baik dan benar dengan target 45 Perangkat Daerah sedangkan capaian indikator tersebut sebesar 30 Perangkat Daerah.

Untuk melihat tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada perbandingan tabel berikut :

TABEL 3.4.1
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
SELAMA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2018
SASARAN 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET 2019
			2016	2017	2018	
4.	Terwujudnya sistem Akunta-bilitas kinerja Penyelenggara-an Pemerintah-an Daerah da-lam terwujudnya Good Local Governance	1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik	85%	90%	100 %	100%
		2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja	90%	95%	100 %	100%
		3. Persentase Pemerintah kab/Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik	85%	93%	100 %	100%

Pencapaian hasil selama kurun waktu tahun 2016 - 2018 mengalami peningkatan dalam arti terjadinya perbaikan dalam penyusunan baik Laporan Kinerja (LKj) maupun Perjanjian Kinerja dari seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Begitu pula dengan capaian kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar dalam penerapan SAKIP.

Apabila diperbandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.4.2
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN TARGET PADA RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA 2018			Target Renstra (2019)
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Terwujudnya sistem Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dae-rah dalam terwujud-nya Good Local Governance	1. Persentase SKPD Pemprov yang menyusun Laporan Kinerja dengan baik	75%	90%	100	90%
		2. Tingkat pemahaman SKPD Pemkab / kota terkait kebijakan pengembangan akuntabilitas kinerja	75%	95%	100	95%

		3. Persentase Pemerintah Kab/ Kota yang menerapkan SAKIP dengan baik	98%	93%	94, 90	95%

Dilihat dari Renstra Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Tahun 2013-2018, untuk tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan.

Terlepas dari hasil capaian kinerja tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian Sasaran ini, yaitu :

a. Masih terdapat penyajian análisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara konprehensip.
b. Kepatuhan memenuhi batas waktu penyampaian Laporan Kinerja, yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut antara lain :

a. Memberikan pemahaman kepada seluruh SKPD untuk membuat análisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
b. Memberikan peringatan kepada SKPD yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat telah dialokasi anggaran dalam APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.654.670.850,00. Anggaran ini merupakan angka setelah adanya perubahan anggaran. yang terdiri atas anggaran program rutin/penunjang sebesar Rp. 818.723.500,00 dan anggaran program prioritas sebesar Rp. 1.835.947.350,00 sebagaimana yang terdapat dalam tabel yaitu :

TABEL 3.5
ALOKASI DAN REALISASI PROGRAM/KEGIATAN POKOK/PRIORITAS

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	**PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**452.152.950**	**431.927.700**	**95,53**
	1) Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	43.700.000	39.769.300	91,19
	2) Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	79.357.450	78.278.900	98,64
	3) Penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	91.523.900	87.937.000	96,08
	4) Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	90.292.000	89.412.000	99,03
	5) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	92.280.000	82.098.000	88,97
	6) Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat	55.000.000	54.432.500	98,97

B.	**PROGRAM PENATAAN KETATALAKSA-NAAN PEMERINTAH DAERAH**	**392.749.400**	***391.780.300***	**99,75**
	1) Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	46.000.000	46.000.000	100
	2) Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota	50.912.000	50.401.000	99,00
	3) Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	71.012.800	70.981,700	99,96
	4) Fasilitasi Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	51.079.000	50.711.800	99,28
	5) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	57.974.000	57.887.200	99,90
	6) Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	28.008.000	28.008.000	100
	7) Inovasi Pelayanan Publik	87.790.600	87.790.600	100
C.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEM-BANGAN SUMBER DAYA APARATUR**	**741.346.225**	**735.046.800**	**99,15**
	1) Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar	91.100.250	91.034.350	99,93
	2) Asistensi Formasi PNS	99.985.000	99.985.000	100
	3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	27.164.350	27.164.350	100
	4) Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Prov. Kalbar	82.492.885	82.492.885	100
	5) Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar	100.100.000	97.380.789	97
	6) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan se-Kalbar	66.967.500	66.677.700	99,57
	7) Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	97.244.500	95.664.000	98,38
	8) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda	60.192.250	59.112.250	98,21
	9) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda	70.568.000	68.483.000	97,05
	10) Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	67.408.800	67.033.800	99,44
D.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWA-SAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN**	**249.698.775**	**184.712.800**	**73,97**
	1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2017	75.583.325	72.797.350	96,31
	2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2018	54.915.450	54.915.450	100
	3) Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD Pemprov Kalbar Tahun 2017	36.400.000	36.400.000	97,76
	4) Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	82.800.000	20.600.000	24,88
	JUMLAH	**1.835.947.350**	**1.743.467.600**	**97,02**

BAB IV
PENUTUP

Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2018, khususnya untuk 4 (empat) Sasaran, 4 (empat) Program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja telah mencapai **97,02**% atau dapat dikatagorikan **Sangat Berhasil.**

Tingkat pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tertatanya kelembagaan pe-rangkat daerah Provinsi / Kabupaten / kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simpilikasi, sebesar 95,53%, yang mencakup program antara lain ;
   - *Program Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah (95,53%)*
2. Meningkatnya sistem, prosedur dan standarisasi ketatalak-sanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas sebesar 99,75%, yang mencakup program antara lain :
   - *Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah (99,75%).*
3. Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, tersedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur setda, serta pemanfaatan perpustakaan setda, sebesar 99,15%, yang mencakup program antara lain :
   - *Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (99,15%).*
4. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance, sebesar 73,97%, yang mencakup program antara lain :
   - *Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan (73,97%).*

Secara umum, capaian kinerja yang dicapai tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Capaian kinerja untuk 4 (empat) sasaran yang dilakukan pengukuran dapat dikatagorikan Sangat Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 97,02%.
- Capaian kinerja untuk 4 (empat) program pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikatagorikan Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 97,02%.
- Capaian kinerja untuk 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pokok yang dilakukan pengukuran dapat dikatagorikan Sangat Berhasil dengan pencapaian kinerja sebesar 97,02%.

Walaupun pencapaian kinerja dikatakan berhasil, namun masih ada beberapa hambatan didalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan di atas, antara lain :

a. Masih adanya revisi berbagai Peraturan Perundang-Undangan di bidang organisasi.
b. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang penggunaan pakaian dinas lapangan di Perangkat Daerah yang melayani langsung ke masyarakat.
c. Belum semua Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melaporkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
d. Belum adanya sinkronisasi di bidang ketatalaksanan dalam pengimplementasian Peraturan, antara Kementerian PAN & RB serta Kementerian Dalam Negeri.
e. Masih rendahnya pemahaman aparatur dalam penyusunan SOP.
f. Masih terdapat penyajian análisis program/kegiatan dalam pencapaian keberhasilan atau kegagalan yang belum dijabarkan secara komprehensip.
g. Masih rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian Laporan Kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Kalbar.

Hal-hal yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau kendalai tersebut, antara lain :

a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait agar membuat segera membuat Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas dimaksud.
c. Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan SKM di daerah sehingga mengikat semua unit pelayanan dalam melaksanakan SKM.
d. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/kota melalui kegiatan sosialisasi dibidang ketatalaksanaan.
e. Perlu diadakan sosialisasi atau in house training oleh masing–masing Perangkat Daerah.
f. Memberikan pemahaman kepada seluruh Perangkat Daerah untuk membuat análisis pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja.
g. Memberikan peringatan kepada Perangkat Daerah yang menyampaian Laporan Kinerja (LKj) melampaui batas waktu yang ditentukan.

Pontianak, [illegible] Januari 2019
KEPALA BIRO ORGANISASI

MARJANI, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Instansi/Unit Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	%
1.	Tertatanya kelembagaan pe-rangkat daerah *Provinsi* / Kabupaten/kota yang efisien, efektif, dan proporsional serta tepat ukuran sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka men-dukung peningkatan pem-bangunan masyarakat de-ngan menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sin-kronisasi dan simplifikasi	1) Pengembangan wawasan dalam rangka Penataan *Kelembagaan Perangkat* Daerah Provinsi	2 Provinsi	2 Provinsi	100
		2) Koordinasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100
		3) Penyusunan Pergub Tupoksi Perangkat Daerah Prov. Kalbar	5 Rapergub	15 Pergub	300
		4) Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100
		5) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Organisasi se-Kalbar	80 Peserta	80 Peserta	100
		6) Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Tupoksi UPT dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Meningkatnya sistem, prose-dur dan standarisasi ketata-laksanaan yang efisien dan efektif serta mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandar dan berkualitas	1) Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	20 SOP	20 SOP	100
		2) Monev Penataan Ketatalaksanaan pada Kabupaten/Kota	4 Kab/ Kota	4 Kab/ Kota	100
		3) Penyusunan Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan	1 Pergub	1 Pergub	100
		4) *Fasilitasi Penyusunan* Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	*100%*	*100%*	*100*
		5) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100
		6) Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Kalbar	14 Kab/Kota	5 Kab/Kota	35,71
		7) Inovasi Pelayanan Publik	11 Inovasi	11 Inovasi	100
3.	Terwujudnya pembinaan aparatur formasi PNS, Jabatan Fungsional, ter-sedianya informasi jabatan, informasi diklat dan Re-formasi Birokrasi serta me-ningkatnya kualitas sumbe-rdaya aparatur setda, me-ningkatnya kualitas pelaya-nan dan pemanfaatan minat baca serta pemanfaatan	1) Fasilitasi dan Penyusunan Formasi PNS dilingkungan Provinsi Kalbar	15 Dokumen	13 Dokumen	98,05
		2) Asistensi Formasi PNS	113 Unit Kerja	113 Unit Kerja	100
		3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		4) Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan Analisis Beban Kerja dilingkungan Prov. *Kalbar*	6 Dokumen	6 Dokumen	100

	perpustakaan setda.	5) Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Prov. Kalbar	10 Dokumen	14 Dokumen	100
		6) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan se-Kalbar	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100
		7) Workshop Analisis Jabatan di Lingkungan Pemprov. Kalbar	70%	70%	100
		8) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda	1 Tahun	1 Tahun	100
		9) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Setda	100%	100%	100
		10) Pengelolaan Perpustakaan Setda Prov. Kalbar	350 Orang	350 Orang	100
4.	Terwujudnya Sistem Akun-tabilitas Kinerja Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya Good Local Governance.	1) Penyusunan Laporan Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2017	1 Laporan	1 Laporan	100
		2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemprov Kalbar Tahun 2018	1 Laporan	1 Laporan	100
		3) Asistensi Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja SKPD *Pemprov Kalbar Tahun 2017*	75%	75%	100
		4) Workshop Penyusunan Cascading Kinerja OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	95%	70%	73,68

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : Rp. 1.835.947.350,00
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2018 : *Rp. 1.743.467.600,00*

Pontianak, 28 Januari 2019
KEPALA BIRO ORGANISASI,

MARJANI, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012

LAMPIRAN 1
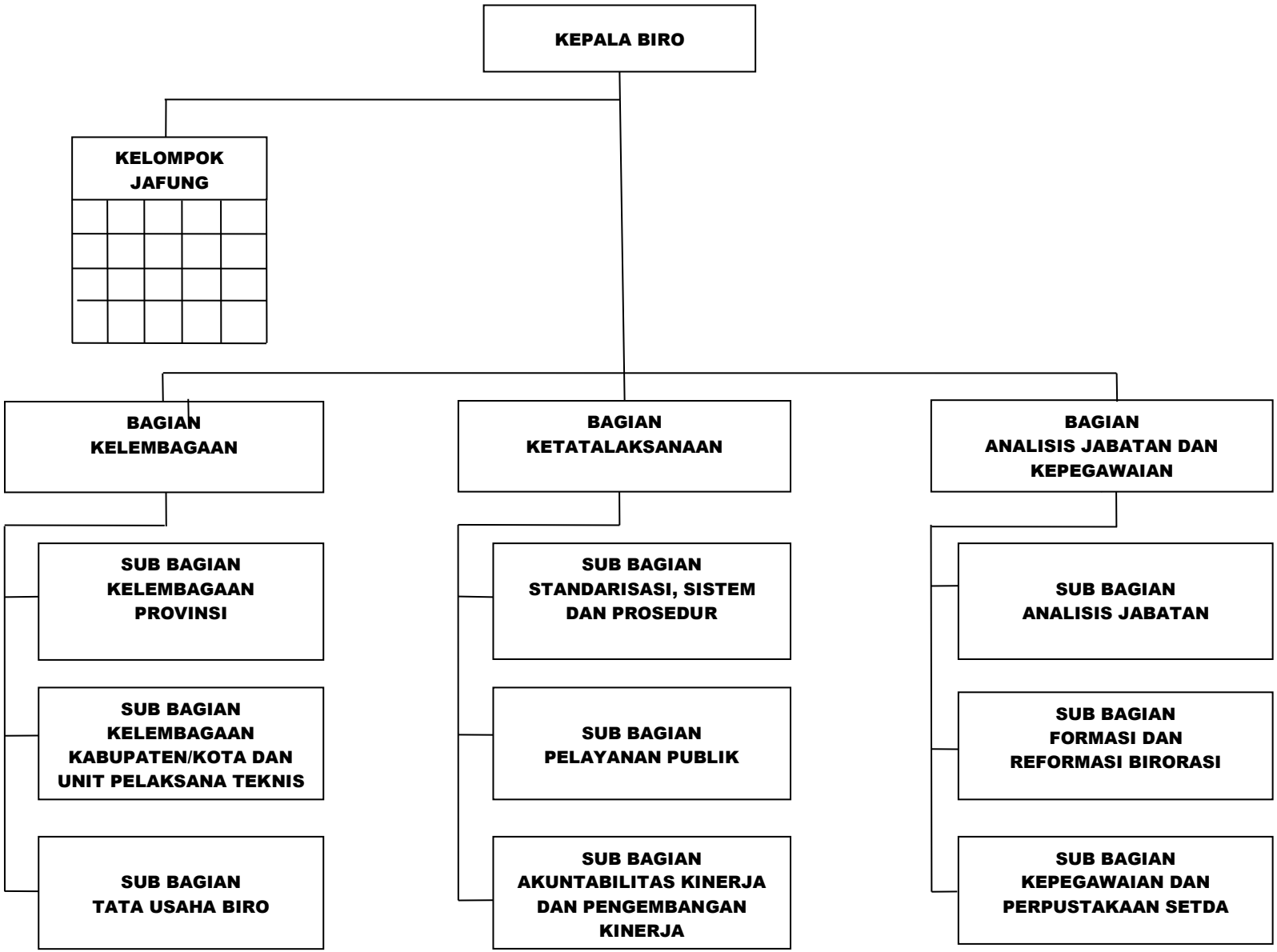
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Sesuai Peraturan Gubernur Nomor : 95 Tahun 2016)